

LITERATUR REVIEW: KEBIJAKAN OTONOMI PENDIDIKAN**Shelty D.M. Sumual¹, Christian Bagensa², Anastasya F. Matindas³,****Ria A. Tumakaka⁴, Anastasya M.M. Runtulalo⁵**

sheltysumual@unima.ac.id¹, chandra.bagensa@gmail.com², anastasyamatindas10@gmail.com³,
riaatumakaka@gmail.com⁴, tasyamillanisti@gmail.com⁵

Universitas Negeri Manado**ABSTRAK**

Kajian ini membahas kebijakan otonomi pendidikan sebagai wujud desentralisasi di sektor pendidikan yang bertujuan meningkatkan mutu, relevansi, dan pemerataan layanan pendidikan di Indonesia. Sejak reformasi pemerintahan, pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah dan ke tingkat sekolah membawa implikasi besar terhadap tata kelola pendidikan, termasuk dalam aspek pendanaan, pengelolaan guru, kurikulum lokal, dan inovasi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis teori-teori desentralisasi, manajemen berbasis sekolah, good governance, dan human capital untuk memahami hubungan antara otonomi, kapasitas lokal, serta mutu pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa otonomi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pembelajaran apabila didukung oleh kapasitas manajerial sekolah, kemampuan fiskal daerah, dan sistem akuntabilitas yang transparan. Implementasi kebijakan seperti Manajemen Berbasis Sekolah, dana BOS, Kurikulum Merdeka, dan muatan lokal di berbagai daerah membuktikan variasi hasil yang sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya dan dukungan kelembagaan. Di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan antar daerah, keterbatasan kapasitas manajemen sekolah, dan ketidaksesuaian antara otonomi lokal dan standar nasional. Secara akademik, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan otonomi pendidikan bersifat kontekstual dan mensyaratkan keseimbangan antara kemandirian daerah dengan regulasi nasional. Otonomi tanpa kapasitas dan pengawasan yang memadai berpotensi memperbesar kesenjangan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang adaptif, berbasis bukti, serta menekankan penguatan kapasitas manajerial dan pemerataan sumber daya agar otonomi benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Otonomi Pendidikan.

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi tata kelola pemerintahan, otonomi pendidikan muncul sebagai salah satu strategi kebijakan yang dipilih banyak negara untuk meningkatkan relevansi, efisiensi, dan mutu layanan pendidikan melalui pemindahan wewenang dari pusat ke daerah dan ke tingkat sekolah. Di Indonesia, reformasi desentralisasi yang dimulai awal 2000-an membawa konsekuensi besar bagi pengelolaan pendidikan: anggaran pendidikan, pengelolaan guru, kurikulum lokal, dan keputusan operasional sekolah menjadi semakin dipengaruhi oleh pemerintah daerah dan oleh otoritas sekolah itu sendiri. Perubahan struktural ini dilatarbelakangi harapan bahwa keputusan yang dibuat lebih dekat dengan konteks lokal akan lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik serta mendorong inovasi dalam praktik pembelajaran. Namun di balik harapan tersebut, bukti empiris menunjukkan dinamika yang kompleks: otonomi tidak otomatis menghasilkan perbaikan kualitas tanpa dukungan kapasitas manajerial, sumber daya fiskal, dan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Laporan internasional dan studi lintas-negara menunjukkan adanya hubungan positif antara otonomi sekolah dan hasil belajar pada rata-rata PISA, namun efek tersebut bersyarat bergantung pada konteks fiskal dan kapasitas lokal sehingga keberhasilan kebijakan tergantung pada kombinasi kebijakan administratif, fiskal, dan dukungan sekolah.

Permasalahan yang nyata dan terukur di lapangan adalah ketimpangan implementasi dan hasil antara daerah. World Bank mencatat bahwa desentralisasi di Indonesia disertai peningkatan belanja pendidikan yang besar dengan “Decentralization was accompanied by an increase in education spending by an estimated 200 percent in real terms since 2002” dan kenaikan pendaftaran siswa yang signifikan; namun peningkatan sumber daya ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran antar wilayah. Data nasional dan kajian empiris lokal mengindikasikan bahwa daerah dengan kapasitas tata kelola, profesionalisme pimpinan sekolah, dan akses sumber daya yang lebih baik memanfaatkan otonomi untuk inovasi; sementara daerah yang lebih lemah menghadapi masalah ketidakmerataan, kurangnya transparansi penggunaan dana, dan keterbatasan kapasitas pengambilan keputusan. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa otonomi sebagai kebijakan bersifat kontekstual dan menuntut penguatan kapasitas: otonomi tanpa kapasitas cenderung mereproduksi atau bahkan memperburuk kesenjangan pendidikan.

Selain ketimpangan antar-daerah, penelitian juga menunjukkan masalah implementasi di tingkat sekolah: kebijakan yang memberi wewenang formal tidak selalu berujung pada ‘otonomi nyata’ dalam praktik. Studi-studi empiris menekankan bahwa “school autonomy is also positively related with educational outcomes” tetapi menambahkan bahwa peluang dan hasil dari otonomi bergantung pada bagaimana otonomi tersebut diterjemahkan menjadi keputusan operasional konkret (mis. pengelolaan sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan inovasi kurikulum yang sensitif budaya lokal). Dengan kata lain, dimensi hukum/struktur otonomi harus disertai dengan kapabilitas manajerial kepemimpinan sekolah, akuntabilitas komunitas, dan dukungan teknis dari pemerintah daerah agar kebijakan berbuah perbaikan mutu. Kesenjangan antara otonomi formal dan otonomi yang teraktualisasi menjadi titik kritis yang perlu dikaji lebih dalam.

Dari perspektif ilmu kebijakan publik dan ilmu pendidikan, kajian otonomi pendidikan penting karena menyentuh problem inti: bagaimana menggabungkan prinsip-prinsip desentralisasi (responsivitas, partisipasi, fleksibilitas) dengan tujuan normatif pendidikan (kesetaraan, kualitas, akuntabilitas). Konsep-konsep yang layak digalih lebih dalam meliputi: (1) komplementaritas fiskal-administratif yaitu bagaimana kapasitas fiskal daerah melengkapi otonomi sekolah agar keputusan lokal dapat dibiayai dan dilaksanakan; (2) kapasitas kepemimpinan sekolah peran kepala sekolah dan dewan sekolah dalam menerjemahkan otonomi menjadi praktik pembelajaran yang efektif; (3) mekanisme akuntabilitas multi-tingkat bagaimana pengawasan dan partisipasi masyarakat menjamin penggunaan otonomi yang baik; dan (4) keadilan distribusi sumber daya bagaimana kebijakan otonomi dapat dirancang untuk mengurangi, bukan memperbesar, disparitas antar-wilayah. Pendekatan interdisipliner (policy analysis, ekonomi pendidikan, manajemen organisasi sekolah) diperlukan untuk memahami interaksi antar-faktor tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang pragmatis.

Secara ringkas namun padat, landasan teori yang relevan meliputi teori desentralisasi publik (teori alokasi efisiensi lokal dan teori tanggung jawab politik), teori manajemen sekolah (school leadership and capacity building), serta teori keadilan pendidikan (equity in resource distribution). Teori desentralisasi menekankan bahwa keputusan yang lebih dekat kepada warga dapat meningkatkan efisiensi dan relevansi layanan, namun juga menimbulkan risiko heterogenitas hasil apabila kapasitas lokal berbeda. Teori manajemen sekolah menunjukkan pentingnya investasi pada kepemimpinan dan profesionalisme guru agar otonomi dioperasionalkan secara efektif. Dengan landasan-landasan ini, penelitian tentang otonomi pendidikan harus menggabungkan analisis kuantitatif efek kebijakan (mis. pengaruh terhadap hasil belajar dan ketimpangan) dan kajian kualitatif implementasi (studi kasus kapasitas sekolah dan praktik akuntabilitas).

Untuk memperkaya pemahaman empiris dan menuntun rekomendasi kebijakan, kajian ini akan memanfaatkan bukti lintas-negara dan studi lokal dalam dekade terakhir yang menunjukkan pola umum: otonomi dapat meningkatkan hasil pendidikan bila disertai kapasitas fiskal dan administratif serta kepemimpinan sekolah yang kuat; sebaliknya, tanpa kombinasi pendukung tersebut, otonomi berpotensi memperkuat ketimpangan. Kutipan langsung yang relevan antara lain: “School autonomy is also positively related with educational outcomes.” (OECD, 2019) dan “Decentralization was accompanied by an increase in education spending by an estimated 200 percent in real terms since 2002.” (World Bank, 2020). Kutipan-kutipan ini menegaskan kedua sisi argumen potensi manfaat dan kebutuhan prasyarat yang menjadi kerangka analitis bagi penelitian lebih lanjut.

Dengan demikian, urgensi kajian ini jelas: merumuskan desain otonomi pendidikan yang sensitif konteks, berfokus pada peningkatan kapasitas manajerial sekolah dan pemerataan fiskal, serta menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif merupakan prasyarat agar otonomi dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu dan keadilan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengisi celah kebijakan dengan analisis empiris terintegrasi menghubungkan indikator kinerja, distribusi sumber daya, dan praktik implementasi sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bersifat operasional dan berdasar bukti.

Metode Penulisan

Metode pada penulisan ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. menurut Nazir (2003) Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Juga, Studi kepustakaan menurut Syaibani (2012) adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kebijakan Otonomi Pendidikan

1. Pendahuluan

Kebijakan otonomi pendidikan merupakan salah satu bentuk implementasi dari otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Otonomi pendidikan secara umum dipahami sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bahkan sampai pada tingkat satuan pendidikan, agar pengelolaan pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan adanya otonomi, sekolah dan daerah diharapkan mampu berinovasi, meningkatkan kualitas, serta menyesuaikan program pendidikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar.

Sejak era reformasi, kebijakan desentralisasi menjadi tonggak penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pendidikan, sebagai sektor strategis, juga terkena dampak dari kebijakan tersebut. Pasca tahun 2018, isu otonomi pendidikan semakin menguat seiring dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional dan tuntutan adaptasi terhadap perkembangan global, termasuk revolusi industri 4.0 dan digitalisasi.

2. Konsep Kebijakan Otonomi Pendidikan

Otonomi pendidikan merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan untuk mengatur dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Setelah tahun 2018, kebijakan otonomi pendidikan di Indonesia semakin relevan seiring dengan tuntutan desentralisasi dan penguatan mutu pendidikan.

Menurut Suryadi (2019), otonomi pendidikan berorientasi pada desentralisasi pengelolaan pendidikan, di mana sekolah memiliki ruang untuk menentukan strategi pembelajaran, kurikulum muatan lokal, serta pengelolaan sumber daya sesuai konteks daerah. Hal ini diperkuat oleh pendapat Kristiawan dan Muhammin (2020) yang menegaskan bahwa otonomi pendidikan menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Di sisi lain, otonomi pendidikan juga tidak lepas dari tantangan, misalnya kesenjangan kapasitas antar daerah. Anwar (2021) menyebutkan bahwa tidak semua pemerintah daerah mampu mengelola otonomi pendidikan dengan baik, sehingga masih dibutuhkan pendampingan dan regulasi yang jelas dari pemerintah pusat. Hal serupa diungkapkan oleh Wibowo (2022), yang menyatakan bahwa otonomi pendidikan hanya akan berhasil apabila diimbangi dengan peningkatan kapasitas manajemen sekolah dan kepala daerah.

Kebijakan otonomi pendidikan pasca-2018 juga dipengaruhi oleh dinamika globalisasi dan era digital. Menurut Prasetyo (2021), implementasi otonomi pendidikan di era digital menuntut sekolah untuk lebih adaptif, terutama dalam pengelolaan teknologi pembelajaran dan inovasi kurikulum. Oleh karena itu, otonomi pendidikan di Indonesia perlu dipahami bukan hanya sebagai pelimpahan kewenangan, tetapi juga sebagai strategi membangun kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Menurut Suryadi (2019), otonomi pendidikan adalah kebijakan yang memberikan ruang kepada sekolah, guru, dan masyarakat untuk mengatur serta mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Konsep ini tidak hanya bermakna pelimpahan kewenangan, tetapi juga menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Kristiawan & Muhammin (2020) menjelaskan bahwa hakikat otonomi pendidikan adalah *school-based management* atau manajemen berbasis sekolah, di mana sekolah menjadi pusat pengambilan keputusan pendidikan, terutama dalam aspek kurikulum muatan lokal, pengelolaan sumber daya, serta penentuan metode pembelajaran. Dengan demikian, otonomi pendidikan adalah instrumen untuk menciptakan keberagaman praktik pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Dengan demikian, konsep kebijakan otonomi pendidikan setelah 2018 dapat dipahami sebagai upaya desentralisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas, relevansi, dan pemerataan pendidikan, dengan catatan perlu adanya dukungan regulasi, peningkatan kapasitas daerah, serta inovasi berkelanjutan.

3. Landasan Teoretis Kebijakan Otonomi Pendidikan

Kajian tentang otonomi pendidikan dapat dipahami melalui beberapa teori utama, antara lain:

a. Teori Desentralisasi (Rondinelli, 1981)

Teori desentralisasi menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks pendidikan, desentralisasi memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menyesuaikan pengelolaan pendidikan dengan kondisi lokal. Teori ini menjadi dasar logis dari kebijakan otonomi pendidikan di Indonesia.

b. Teori Manajemen Berbasis Sekolah (School-Based Management)

School-Based Management (SBM) menekankan pentingnya pelibatan kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Menurut Mulyasa (2020), SBM merupakan bentuk konkret dari otonomi pendidikan yang menuntut kemandirian sekolah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan.

c. Teori Good Governance

Good governance dalam pendidikan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Wibowo (2022) menyebutkan bahwa kebijakan otonomi pendidikan hanya akan berhasil apabila dijalankan dengan tata kelola yang baik, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara sekolah di daerah maju dan tertinggal.

d. Teori Human Capital (Becker, 1993)

Teori modal manusia menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Otonomi pendidikan, dengan pelibatan daerah dan sekolah, diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih kontekstual untuk meningkatkan kualitas SDM di tingkat lokal maupun nasional.

4. Implementasi Kebijakan Otonomi Pendidikan

Otonomi pendidikan di Indonesia diimplementasikan melalui beberapa kebijakan konkret, antara lain:

a. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

MBS merupakan bentuk nyata otonomi pendidikan di tingkat sekolah. Sekolah diberi keleluasaan dalam mengelola kurikulum muatan lokal, keuangan, sarana prasarana, serta proses pembelajaran.

b. Kebijakan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

BOS merupakan instrumen desentralisasi pembiayaan pendidikan. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola dana BOS sesuai kebutuhan operasionalnya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

c. Kurikulum Muatan Lokal

Pemerintah memberi ruang bagi daerah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik budaya dan potensi ekonomi lokal. Contohnya adalah pelajaran bahasa daerah, kearifan lokal, atau keterampilan berbasis potensi wilayah.

d. Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka

Program ini menegaskan semangat otonomi dalam inovasi pendidikan. Sekolah diberi keleluasaan dalam memilih strategi pembelajaran, asesmen, serta pengembangan kompetensi siswa sesuai dengan konteks lokal.

5. Contoh Konkret Kebijakan Otonomi Pendidikan

a. Kurikulum Muatan Lokal di Yogyakarta

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengintegrasikan *Bahasa Jawa* sebagai muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Hal ini merupakan wujud otonomi pendidikan untuk melestarikan budaya lokal sekaligus memperkuat identitas daerah.

b. Pengelolaan BOS di Sekolah Dasar Kota Bandung

Sekolah-sekolah di Kota Bandung diberi kewenangan menggunakan dana BOS untuk mengembangkan laboratorium komputer dan sarana literasi digital, menyesuaikan kebutuhan pembelajaran abad 21.

c. Program Sekolah Rintisan Digital di Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya melalui kewenangan otonomi pendidikan mengembangkan sekolah digital dengan fasilitas e-learning, yang memungkinkan siswa terbiasa dengan teknologi informasi sejak dini.

d. **Kurikulum Kearifan Lokal di Bali**

Di Bali, kebijakan otonomi pendidikan diwujudkan dalam pengajaran seni tari, gamelan, dan agama Hindu sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal.

e. **Sekolah Penggerak di Papua**

Di beberapa daerah Papua, sekolah penggerak diberi keleluasaan untuk menyusun strategi pembelajaran kontekstual, misalnya melalui integrasi budaya lokal dalam mata pelajaran.

6. Tantangan Kebijakan Otonomi Pendidikan

Walaupun menawarkan banyak peluang, kebijakan otonomi pendidikan juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- a) **Kesenjangan antar daerah:** Tidak semua daerah memiliki kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai untuk menjalankan otonomi pendidikan.
- b) **Keterbatasan Kapasitas Manajerial Sekolah:** Banyak sekolah masih menghadapi kendala dalam hal manajemen keuangan, perencanaan, dan evaluasi program.
- c) **Potensi Penyalahgunaan Dana BOS:** Lemahnya pengawasan dapat membuka peluang korupsi atau penggunaan dana yang tidak tepat sasaran.
- d) **Standardisasi Nasional:** Otonomi kadang berbenturan dengan tuntutan standar pendidikan nasional, misalnya kurikulum dan asesmen.

7. Peluang Kebijakan Otonomi Pendidikan

Meskipun terdapat tantangan, kebijakan otonomi pendidikan tetap memiliki peluang besar, antara lain:

- a) **Inovasi Pendidikan Lokal:** Sekolah dan daerah dapat berkreasi sesuai dengan potensi daerahnya.
- b) **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:** Orang tua dan masyarakat dapat lebih terlibat dalam mendukung pendidikan.
- c) **Pendidikan yang Relevan:** Kurikulum lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global.

Penguatan Identitas Daerah: Muatan lokal dapat memperkuat budaya daerah dalam kerangka kebangsaan

KESIMPULAN

Konsep kebijakan otonomi pendidikan merupakan wujud desentralisasi yang bertujuan meningkatkan mutu, relevansi, dan pemerataan pendidikan. Dengan landasan teori desentralisasi, manajemen berbasis sekolah, good governance, dan human capital, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian sekolah, partisipasi masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia.

Contoh implementasi nyata, seperti kurikulum muatan lokal di Yogyakarta, pengelolaan BOS di Bandung, sekolah digital di Surabaya, hingga sekolah penggerak di Papua, menunjukkan bahwa otonomi pendidikan dapat berjalan baik jika didukung kapasitas manajemen yang kuat, pengawasan yang ketat, dan komitmen pemerintah daerah.

Namun, kesenjangan antar daerah dan keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan otonomi pendidikan sangat bergantung pada keseimbangan antara otonomi daerah dengan regulasi nasional, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Konsep kebijakan otonomi pendidikan merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui desentralisasi kewenangan. Dengan

landasan teori desentralisasi, manajemen berbasis sekolah, good governance, dan human capital, otonomi pendidikan diharapkan mampu mendorong kemandirian sekolah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan lokal dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2021). Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Manajemen Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 15(2), 101–115.
- Becker, G. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Kristiawan, M., & Muhammin, M. (2020). Implementasi Otonomi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 45–56.
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, A. (2021). Otonomi Pendidikan di Era Digital: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(3), 233–247.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
- Suryadi, A. (2019). Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, T. (2022). Kebijakan Otonomi Pendidikan: Perspektif Manajemen Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 10(2), 78–90.
- OECD. (2019). Cross-country evidence on the impact of decentralisation and school autonomy on educational performance. OECD Publishing. (Laporan; DOI: tidak tersedia; PDF sumber: OECD).
- World Bank. (2020). *The Promise of Education in Indonesia*. World Bank. (Laporan; DOI: tidak tersedia; akses: World Bank).
- Sari, V. A. (2019). Educational Assistance and Education Quality in Indonesia. *Population and Development Review* (contoh; DOI: 10.1111/padr.12272). (Catatan: akses penuh dibatasi oleh penerbit).
- Setiawan, A. (2023). The impact of Indonesia's decentralized education on local curriculum implementation. *Jurnal Pendidikan Vokasi (UNY)*. (Artikel lokal, 2023).
- Kuhon, R. (2020). Decentralisation and Education for All in Indonesia. *Polyglot: Jurnal Ilmiah*, 16(1). DOI: 10.19166/pji.v16i1.1996.
- International Education Studies / IES. (2017). Decentralization of Education in Indonesia—A Study on Education Development Gaps in Provincial Areas. DOI: 10.5539/ies.v10n7p79.
- Neeleman, M. B. M., et al. (2019). The scope of school autonomy in practice: An empirically validated classification. *Journal of School Leadership/related* (contoh). (Akses: Springer).
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syaibani, R. 2012. *Studi Kepustakaan*, (Online), (<http://repository.usu.ac.id/> bitstream, diakses 4 Oktober 2016).